

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan reformasi anggaran yang mengedepankan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi publik, dan penyusunan APBD berbasis kinerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas APBD. Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2009) menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Di samping itu adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempertinggi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh dewan maka proses penyusunan APBD akan semakin berkualitas.

Mardiasmo (2002) menyatakan dengan dikeluarkannya undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan era baru dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, yaitu pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan

menejemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Misi utama dari kedua UU tersebut adalah desentralisasi.

Sukiadi (dalam Setyawan 2003) menyatakan kedua UU tersebut mengandung beberapa misi yang tersurat. Pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tujuan kebijaksanaan desentralisasi adalah untuk mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mengurangi subsidi dari pemerintah pusat, dan mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah (Triadji, 2002).

Undang-undang tersebut menjadi sangat penting karena akan membawa perubahan yang mendasar pada kehidupan sistem pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada sistem pemerintahan khususnya pemerintah daerah perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab (Sukiadi dalam Setyawan 2003). Mardiasmo (2002) menyebutkan jika pada masa sebelumnya otonomi daerah hanya dijadikan politik belaka, akan tetapi daerah saat ini ditantang kesiapannya baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi untuk dapat mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Oleh

karena itu pemerintah daerah dituntut untuk melakukan reformasi kelembagaan dilingkungan mereka (*institutional reform*).

Partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah sebagai bagian dari semangat *good governance*. Partisipasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan didalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karena anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah arah kebijakan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam langkah-langkah nyata pembangunan daerah dalam Achmadi (2002).

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang sudah dilakukan Sopanah dan Isa Wahyudi (2009) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Alasan peneliti mereplikasi penelitian Sopanah dan Isa wahyudi (2009) adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil penelitian yang pernah dilakukan dahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, organisasi masyarakat di kecamatan Bendosari, Nguter dan Tawang Sari yang berada di kabupaten Sukoharjo.

Dari penjelasan tersebut, penulis kemudian menuangkan permasalahannya dalam penelitian dengan judul: **“PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah ada pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo ?
2. Apakah ada pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan di Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk menguji pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pihak Pemerintah Sukoharjo

Sebagai masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta transparansi kebijakan publik dalam hal pengawasan keuangan daerah.

## 2. Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pengawasan keuangan daerah serta peraturan yang berlaku.

### **E. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini secara sistematika terdiri dari lima bab dengan urutan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan menguraikan teori-teori sebagai landasan penelitian, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data dan sumber data, teknik analisis data serta metode analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis dan pembahasan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.